



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2018.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi penambahan pagu dana Desa yang berberasal dari alokasi afirmasi karena terjadinya perubahan status desa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Rincian Perubahan Alokasi Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Rincin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 442);
19. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 494);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Penyempurnaan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 518);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Landak ini.
2. Ketentuan pasal 9 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

3. Ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta ketentuannya telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - (3) Persetujuan Bupati Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
4. Ketentuan pasal 13 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Landak yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
5. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
 - (1) Pengelolaan Dana Desa untuk Program Padat Karya Tunai menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - (2) Pengembalian Dana Desa yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran dan hasil temuan auditor internal yang menyebabkan kerugian pada keuangan desa, dikembalikan ke Rekening Kas Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Landak ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRETNATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ALFIUS

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2018.

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
1	2		4	5	6	$(7) = (4) + (5) + (6)$
1.	NGABANG	HILIR KANTOR	616,345,000	0	166,128,000	782,473,000
2.	NGABANG	HILIR TENGAH	616,345,000	0	115,623,000	731,968,000
3.	NGABANG	RAJA	616,345,000	0	119,354,000	735,699,000
4.	NGABANG	MUNGGUK	616,345,000	315,098,000	209,543,000	1,140,986,000
5.	NGABANG	AMBOYO UTARA	616,345,000	0	197,744,000	814,089,000
6.	NGABANG	SUNGAI KELI	616,345,000	0	203,106,000	819,451,000
7.	NGABANG	RASAN	616,345,000	315,098,000	261,826,000	1,193,269,000
8.	NGABANG	MU'UN	616,345,000	315,098,000	280,401,000	1,211,844,000
9.	NGABANG	AMBARANG	616,345,000	157,549,000	294,184,000	1,068,078,000
10.	NGABANG	ENGGADU	616,345,000	157,549,000	197,187,000	971,081,000
11.	NGABANG	AMANG	616,345,000	0	172,306,000	788,651,000
12.	NGABANG	PENYAHU DANGKU	616,345,000	0	100,188,000	716,533,000
13.	NGABANG	ANTAN RAYAN	616,345,000	0	165,100,000	781,445,000
14.	NGABANG	AMBOYO INTI	616,345,000	0	204,380,000	820,725,000
15.	NGABANG	TEBEDAK	616,345,000	0	152,034,000	768,379,000
16.	NGABANG	TEMIANG SAWI	616,345,000	0	129,311,000	745,656,000
17.	NGABANG	AMBOYO SELATAN	616,345,000	157,549,000	344,828,000	1,118,722,000
18.	NGABANG	SEBIRANG	616,345,000	0	110,814,000	727,159,000
19.	NGABANG	PAK MAYAM	616,345,000	157,549,000	219,599,000	993,493,000
20.	MEMPAEPAH HULU	KARANGAN	616,345,000	0	100,332,000	716,677,000
21.	MEMPAEPAH HULU	SAILO	616,345,000	315,098,000	409,571,000	1,341,014,000
22.	MEMPAEPAH HULU	MENTONYEK	616,345,000	0	211,358,000	827,703,000

23	MEMPAEAH HULU	SAMPURO	616,345,000	315,098,000	232,872,000	1,164,315,000
24	MEMPAEAH HULU	SALA'AS	616,345,000	157,549,000	217,724,000	991,618,000
25	MEMPAEAH HULU	SABAKA	616,345,000	315,098,000	272,330,000	1,203,773,000
26	MEMPAEAH HULU	TUNANG	616,345,000	157,549,000	357,080,000	1,130,974,000
27	MEMPAEAH HULU	SUNGAI LAKI	616,345,000	315,098,000	484,140,000	1,415,583,000
28	MEMPAEAH HULU	TIANG TANJUNG	616,345,000	0	293,240,000	909,585,000
29	MEMPAEAH HULU	PAHOKNG	616,345,000	157,549,000	272,698,000	1,046,592,000
30	MEMPAEAH HULU	GARU	616,345,000	315,098,000	181,050,000	1,112,493,000
31	MEMPAEAH HULU	BILAYUK	616,345,000	157,549,000	257,668,000	1,031,562,000
32	MEMPAEAH HULU	CAOKNG	616,345,000	315,098,000	214,735,000	1,146,178,000
33	MEMPAEAH HULU	SALUMANG	616,345,000	157,549,000	214,767,000	988,661,000
34	MEMPAEAH HULU	ANSLOK	616,345,000	0	174,537,000	790,882,000
35	MEMPAEAH HULU	BABATN	616,345,000	0	150,259,000	766,604,000
36	MEMPAEAH HULU	PARIGI	616,345,000	315,098,000	231,944,000	1,163,387,000
37	MEMNJALIN	SEPAHAT	616,345,000	157,549,000	280,043,000	1,053,937,000
38	MEMNJALIN	LAMOANAK	616,345,000	315,098,000	283,890,000	1,215,333,000
39	MEMNJALIN	BENKAWA	616,345,000	315,098,000	297,610,000	1,229,053,000
40	MEMNJALIN	TEMPOAK	616,345,000	315,098,000	240,887,000	1,172,330,000
41	MEMNJALIN	REES	616,345,000	315,098,000	228,702,000	1,160,145,000
42	MEMNJALIN	RABA	616,345,000	315,098,000	222,497,000	1,153,940,000
43	MEMNJALIN	NANGKA	616,345,000	315,098,000	247,008,000	1,178,451,000
44	MEMNJALIN	MEMNJALIN	616,345,000	0	129,531,000	745,876,000
45	MANDOR	SEBADU	616,345,000	0	123,692,000	740,037,000
46	MANDOR	SEMENOK	616,345,000	0	178,209,000	794,554,000
47	MANDDR	MENGGUNYIT	616,345,000	0	110,128,000	726,473,000
48	MANDDR	BEBATUNG	616,345,000	0	111,949,000	728,294,000
49	MANDOR	KEROHDK	616,345,000	0	116,742,000	733,087,000
50	MANDOR	SUM SUM	616,345,000	0	132,006,000	748,351,000
51	MANDOR	SEKILAP	616,345,000	157,549,000	154,935,000	928,829,000
52	MANDDR	MANGGANG	616,345,000	0	124,787,000	741,132,000
53	MANDOR	KERAMAS	616,345,000	0	149,476,000	765,821,000
54	MANDDR	PONGOK	616,345,000	315,098,000	183,974,000	1,115,417,000
55	MANDOR	KAYU ARA	616,345,000	0	141,812,000	758,157,000
56	MANDDR	SELUTUNG	616,345,000	0	111,860,000	728,205,000

57	MANDOR	MANDOR	616,345,000	0	151,917,000	768,262,000
58	MANDOR	SIMPANG KASTURI	616,345,000	0	160,372,000	776,717,000
59	MANDOR	SALA TGA	616,345,000	0	146,989,000	763,334,000
60	MANDOR	KAYU TANAM	616,345,000	0	135,261,000	751,606,000
61	MANDOR	NGARAK	616,345,000	0	166,770,000	783,115,000
62	AIR BESAR	SERIMBU	616,345,000	0	102,912,000	719,257,000
63	AIR BESAR	ENGGAGIN	616,345,000	0	145,009,000	761,354,000
64	AIR BESAR	JAMBU TEMBAWANG	616,345,000	0	188,674,000	805,019,000
65	AIR BESAR	SEPANGAH	616,345,000	0	148,359,000	764,704,000
66	AIR BESAR	MERAYUH	616,345,000	0	183,230,000	799,575,000
67	AIR BESAR	NYARI	616,345,000	0	289,795,000	1,221,238,000
68	AIR BESAR	SEKENDAL	616,345,000	0	525,212,000	1,456,655,000
69	AIR BESAR	SEMUNTIK	616,345,000	0	140,889,000	757,234,000
70	AIR BESAR	TEMYOYOK	616,345,000	0	208,890,000	1,140,333,000
71	AIR BESAR	ENGGAKADI PADE	616,345,000	0	221,816,000	1,153,259,000
72	AIR BESAR	DANGE AJI	616,345,000	0	276,168,000	1,207,611,000
73	AIR BESAR	TENGUWE	616,345,000	0	239,462,000	1,170,905,000
74	AIR BESAR	PAREK	616,345,000	0	389,560,000	1,321,003,000
75	AIR BESAR	BENTANG MADOMONG	616,345,000	0	171,488,000	787,833,000
76	AIR BESAR	TENGGON	616,345,000	0	159,271,000	775,616,000
77	AIR BESAR	SEMPATUNG	616,345,000	0	236,387,000	852,732,000
78	MENYUKE	DARIT	616,345,000	0	148,626,000	764,971,000
79	MENYUKE	MAMEK	616,345,000	0	158,301,000	774,646,000
80	MENYUKE	ANSANG	616,345,000	0	132,078,000	748,423,000
81	MENYUKE	KAYU ARA	616,345,000	0	185,671,000	959,565,000
82	MENYUKE	ANGKARAS	616,345,000	0	229,541,000	1,003,435,000
83	MENYUKE	LADANGAN	616,345,000	0	266,218,000	1,040,112,000
84	MENYUKE	SONGGA	616,345,000	0	251,061,000	1,024,955,000
85	MENYUKE	SIDAN	616,345,000	0	237,902,000	1,011,796,000
86	MENYUKE	BERINANG MAYUN	616,345,000	0	369,401,000	1,143,295,000
87	MENYUKE	LINTAH BETUNG	616,345,000	0	235,920,000	1,167,363,000
88	MENYUKE	ANIK DINGIR	616,345,000	0	128,037,000	744,382,000
89	MENYUKE	BAGAK	616,345,000	0	146,147,000	762,492,000
90	MENYUKE	TOLOK	616,345,000	0	256,776,000	1,030,670,000

91	MENYUKE	SUNGAI LUBANG	616,345,000	0	182,179,000	798,524,000
92	MENYUKE	TAVAS	616,345,000	315,098,000	250,151,000	1,181,594,000
93	MENYUKE	ONGKOL PADANG	616,345,000	0	157,846,000	774,191,000
94	SENGAH TEMILA	PAHAUMAN	616,345,000	0	238,386,000	854,731,000
95	SENGAH TEMILA	PALUAN	616,345,000	0	309,098,000	925,443,000
96	SENGAH TEMILA	SEBATH	616,345,000	315,098,000	403,251,000	1,334,694,000
97	SENGAH TEMILA	SAHAM	616,345,000	315,098,000	328,535,000	1,259,978,000
98	SENGAH TEMILA	ANDENG	616,345,000	157,549,000	299,387,000	1,073,281,000
99	SENGAH TEMILA	SENAKIN	616,345,000	0	380,683,000	997,028,000
100	SENGAH TEMILA	TONANG	616,345,000	0	176,085,000	792,430,000
101	SENGAH TEMILA	BANYANG	616,345,000	0	252,576,000	868,921,000
102	SENGAH TEMILA	SIDAS	616,345,000	0	277,882,000	894,227,000
103	SENGAH TEMILA	KERANJU MANCAL	616,345,000	0	225,960,000	842,305,000
104	SENGAH TEMILA	KERANJU PAIDANG	616,345,000	157,549,000	466,286,000	1,240,180,000
105	SENGAH TEMILA	AUR SAMPUK	616,345,000	315,098,000	281,988,000	1,213,431,000
106	SENGAH TEMILA	GOMBANG	616,345,000	315,098,000	446,877,000	1,378,320,000
107	SENGAH TEMILA	RABAK	616,345,000	315,098,000	239,987,000	1,171,430,000
108	MERANTI	MERANTI	616,345,000	157,549,000	307,154,000	1,081,048,000
109	MERANTI	KELAMPAI SETOLO	616,345,000	157,549,000	237,917,000	1,011,811,000
110	MERANTI	MORO BETUNG	616,345,000	315,098,000	240,855,000	1,172,298,000
111	MERANTI	SELANGE	616,345,000	315,098,000	335,732,000	1,267,175,000
112	MERANTI	AMPADI	616,345,000	315,098,000	325,504,000	1,256,947,000
113	MERANTI	TAHU	616,345,000	315,098,000	311,415,000	1,242,858,000
114	KUALA BEHE	SEMEDANG	616,345,000	0	157,275,000	773,620,000
115	KUALA BEHE	KUALA BEHE	616,345,000	157,549,000	185,770,000	959,664,000
116	KUALA BEHE	NYAYUM	616,345,000	0	182,901,000	799,246,000
117	KUALA BEHE	PAKU RAYA	616,345,000	0	169,240,000	785,585,000
118	KUALA BEHE	PERMIT	616,345,000	315,098,000	193,980,000	1,125,423,000
119	KUALA BEHE	TANJUNG BALAI	616,345,000	0	136,116,000	752,461,000
120	KUALA BEHE	ANGKANYAR	616,345,000	0	172,972,000	789,317,000
121	KUALA BEHE	KEDAMA	616,345,000	315,098,000	224,415,000	1,155,858,000
122	KUALA BEHE	BENGAWAN AMPAR	616,345,000	157,549,000	193,668,000	967,562,000
123	KUALA BEHE	SEHE LUSUR	616,345,000	157,549,000	301,470,000	1,075,364,000
124	KUALA BEHE	SEJOWET	616,345,000	315,098,000	310,871,000	1,242,314,000

125	SEBANGKI	SEBANGKI	616,345,000	315,098,000	335,298,000	1,266,741,000
126	SEBANGKI	KUMPANG TENGAH	616,345,000	315,098,000	474,251,000	1,405,694,000
127	SEBANGKI	AGAK	616,345,000	315,098,000	442,873,000	1,374,316,000
128	SEBANGKI	RANTAU PANJANG	616,345,000	315,098,000	220,430,000	1,151,873,000
129	SEBANGKI	SUNGAI SEGAK	616,345,000	315,098,000	245,511,000	1,176,954,000
130	JELIMPO	TEMAHAR	616,345,000	315,098,000	339,384,000	1,270,827,000
131	JELIMPO	KERSIK BELANTIAN	616,345,000	0	213,505,000	829,850,000
132	JELIMPO	NYIIN	616,345,000	315,098,000	294,495,000	1,225,938,000
133	JELIMPO	PAPUNG	616,345,000	0	176,933,000	793,278,000
134	JELIMPO	SEKAIS	616,345,000	315,098,000	256,924,000	1,188,367,000
135	JELIMPO	MANDOR KIRU	616,345,000	157,549,000	230,459,000	1,004,353,000
136	JELIMPO	JELIMPO	616,345,000	0	140,771,000	757,116,000
137	JELIMPO	TUBANG RAENG	616,345,000	0	179,860,000	796,205,000
138	JELIMPO	KAYU ARA	616,345,000	157,549,000	272,147,000	1,046,041,000
139	JELIMPO	PAWIS HILIR	616,345,000		164,130,000	780,475,000
140	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	616,345,000	157,549,000	187,874,000	961,768,000
141	JELIMPO	BALAI PELUNTAN	616,345,000	0	124,106,000	740,451,000
142	JELIMPO	DARA ITAM I	616,345,000	0	155,450,000	771,795,000
143	BANYUKE HULU	PADANG PIO	616,345,000	157,549,000	266,848,000	1,040,742,000
144	BANYUKE HULU	TEMBAWANG BALE	616,345,000	157,549,000	328,125,000	1,102,019,000
145	BANYUKE HULU	KAMPET	616,345,000	157,549,000	228,403,000	1,002,297,000
146	BANYUKE HULU	UNTANG	616,345,000	315,098,000	230,256,000	1,161,699,000
147	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	616,345,000	157,549,000	372,404,000	1,146,298,000
148	BANYUKE HULU	GAMANG	616,345,000	315,098,000	234,562,000	1,166,005,000
149	BANYUKE HULU	SEMADE	616,345,000	157,549,000	230,797,000	1,004,691,000
150	SOMPAK	SOMPAK	616,345,000	157,549,000	204,232,000	978,126,000
151	SOMPAK	PAUH	616,345,000	157,549,000	270,479,000	1,044,373,000
152	SOMPAK	LINGKONONG	616,345,000	315,098,000	405,759,000	1,337,202,000
153	SOMPAK	GALAR	616,345,000	315,098,000	453,321,000	1,384,764,000
154	SOMPAK	AMAWAKNG	616,345,000	315,098,000	276,844,000	1,208,287,000
155	SOMPAK	TAPAKNG	616,345,000	315,098,000	241,938,000	1,173,381,000
156	SOMPAK	PAKUMBANG	616,345,000	157,549,000	225,320,000	999,214,000
	TOTAL	TOTAL	96,149,820,000	22,056,860,000	35,951,910,000	154,158,590,000

Kontrol Perhitungan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018

Pagu Dana Desa Kabupaten Landak		154,158,590,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Landak	Selisih	154,158,590,000
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Landak		0
Hasil Perhitungan Alokasi Dasar Kabupaten Landak	Selisih	96,149,820,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Landak		0
Hasil Perhitungan Alokasi Afirmasi Kabupaten Landak	Selisih	22,056,860,000
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Landak		0
Hasil Perhitungan Alokasi Formula Kabupaten Landak	Selisih	35,951,910,000
Jumlah Desa		156

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal, 2018

BUPATI LANDAK

KAROLIN MARGARET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal, 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR